ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi kasus pada 3 desa di Kecamatam Muara Payang Kabupaten Lahat)

SKRIPSI

Nama : Prayoga Akbar
NIM : 22 2014 228

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYAH MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi kasus pada 3 desa di Kecamatam Muara Payang Kabupaten Lahat)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Prayoga Akbar
NIM : 22 2014 228

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayoga Akbar

NIM : 222014228

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan pejiplakan (plagiat) karya orang lain. Apabila terbukti di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sangsi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis,

Prayoga Akbar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upayah Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus pada 3 desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)
Nama	: Prayoga Akbar
NIM	: 22 2014 228
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Rosalina Ghozali, S.E., M.Si., Ak	**Mizan, S.E., M.Si.,CA**
NIDN/NBM : 0228115802/1021961	**NIDN/NBM : 0206047101/859196**

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak. CA)

NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Berusaha tanpa Doa itu Sombong, Berdoa tanpa Berusaha itu Bohong.*
- *Jika Orang Lain Bisa, Maka Aku Juga Termasuk Bisa*
- *Tiada Doa Yang Paling Ampuh Kecuali Doa Kedua Orang Tua.*

(Prayoga Akbar)

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

- *Ayah dan Ibuku Tercinta*
- *Saudari Kandungku*
- *Pembimbing Skripsiku*
- *Sahabatku*
- *Almamaterku*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Mendengar Lagi Melihat atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upayah Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyrakat (Studi Kasus pada Tiga Desa di Kecaamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)". Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna,baik dalam pembahasan, analisa, materi pendukung, dan penelaahan materi ataupun tehnik penyusunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ahmad Basri dan Ibunda Komariah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mebiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dengan penuh cinta kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Hj, Rosalina Ghazali, S.E., Ak.,M.Si. dan Mizan, S.E.,Ak., M.Si.,CA

yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tidak lupa penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E, AK.,M.Si.CA dan ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si selaku ketua dan sekertaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibuk Hj, Rosalina Ghazali,. S.E.,Ak.,M.Si dan Mizan,.S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan serta memberikan saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Saekarini Yuliachtri, S.E.,M.Si.,AK,CA selaku Pembimbing Akademik saya yang memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepada seluruh keluarga dan teman seperjuangan saya yang telah memberikan do’a serta dukungan.

8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaaca. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2019

Penulis

Prayoga Akbar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **ix**

HALAMAN DAFTAR TABEL… ..... **xii**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACK ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 11

1. Pengertian Desa 11

2. Keuangan Desa 12

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 14

4. Alokasi Dana Desa 17

5. Tujuan Alokasi Dana Desa 20

6. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 21

7. Pengeolaan Keuangan Desa 22

8. Pembangunan Desa 33

9. Pemberdayaan Masyarakat 35

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat 35

b. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 36

c. Manfaan Perberdayaan 37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 44

C. Operasionalisasi Variabel 44

D. Populasi Dan Sampel 45

E. Data Yang Diperlukan 46

F. Metode Pengumpulan Data 46

G. Analisis Data Dan Teknik Analisis 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 50

1. Gambaran Umum Ke Tiga Desa Kecamatan Muara Payang 50

2. Visi dan Misi Ketiga Desa Kecamatan Muara Payang 51

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 54

4. Fungsi dan Wewenang Kepala Desa 57

B. Pembahasan Hasil Penelitian 65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN 81

B. SARAN 81

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Jumlah Penduduk dan Perempuan pada Ketiga Desa di Kecamatan Muara Payang 6

Tabel I.2 Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Ketiga Desa Kecamatan Muara Payang 7

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan 42

Tabel III.1 Daftar Kantor Kepala desa 44

Tabel III.2 Operasional Variabel 44

Tabel III.3 Desa-desa di Kecamatan Muara Payang 45

Tabel IV.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Muara Jauh..... 54

Gambar IV. 2 Struktur Organisasi Desa Bandu Agung 55

Gambar IV.3 Struktur Organisasi Desa Lawang Agung Lama..... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran.1 Kartu Aktivitas Bimbingan .....

Lampiran.2 Sertifikat AIK .....

Lampiran.3 Sertifikat TOEFL.....

Lampiran.4 Surat Keterangan Riset .....

ABSTRAK

Prayoga Akbar/222014228/2019/Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upayah Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada tiga desa di kecamatan Muara Payang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyaraakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan pada tiga desa di kecamatan Muara Payang kabupaten Lahat. Variabel dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dana desa. Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di kecamatan Muara Payang Lahat belum berjalan dengan baik dan belum bisa menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama priode tertentu.

Kata kunci : Pengelolaan alokasi dana desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

Prayoga Akbar / 222014228/2019 / Analysis of Management of Village Fund Allocation in Upayah to Improve Community Development and Empowerment

The formulation of the problem in this study is how to manage village fund allocations in three villages in Muara Payang sub-district in an effort to improve development and community empowerment. This study aims to determine the management of the allocation of village funds in an effort to increase development and community empowerment. This type of research is descriptive research. This research will be conducted in three villages in Muara Payang sub-district, Lahat district. The variable in this study is the financial management of village funds. The data needed in this study are primary and secondary data. The analysis techniques used in this study were interviews and documentation. Based on the results of the study, the management of village finances in three villages in the Muara Payang Lahat sub-district had not yet proceeded well and had not been able to complete the village government program in a timely manner during a certain period.

Keywords: Management of village fund allocation, development and community empowerment

PENGESAHAN
NO. 548/Abstract/LB/UMP/VIII/2019
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretariss desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintaha, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan

operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini menurut Riza Ramadhan (2014: 3) masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan

berkelanjutan. Menurut Nurman (2015: 225) penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Djiwadono dalam Nurman (2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2012: 41) pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai

kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa).

Penggunaan dana desa berdasarkan Pasa 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Kabupaten Lahat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang beribukota lahat. Kabupaten Lahat sebenarnya hanya terdiri dari 7 kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah kecamatan di kabupaten Lahat bertambah menjadi 22 kecamatan. Kabupaten Lahat memiliki 22 kecamatan, 509 desa definitif, 4 desa persiapan dan 14 kelurahan dengan luas wilayah kabupaten lahat 4.361,83 km^2.

Muara payang adalah sebuah kecamatan di kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Lawang Agung Lama dan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2008, Muara Payang merupakan pemekaran kedua dari kecamatan Jarai. Kecamatan Muara Payang ini memiliki luas wilayah sebesar 37.50 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak ±8.670 jiwa. Kecamatan ini memiliki 7 desa yaitu desa Muara Payang, desa Muara Gelumpai, desa Talang Tinggi, desa Lawang Agung Lama, desa Lawang Agung Baru, desa Muara Jauh, dan desa Bandu Agung.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Pada Ketiga Desa di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat

Desa	Jumlah Penduduk (orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Lawang Agung Lama	475	415	890
Bandu Agung	732	665	1.397
Muara Jauh	500	416	916

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Pada penelitian ini di pilihlah 3 desa diantara 7 desa yang ada di Kecamatan Muara Payang yaitu: desa Lawang Agung Lama, desa Bandu Agung dan desa Muara Jauh. Alasannya adalah karena ketiga desa ini merupakan desa yang kurang dalam hal pemberdayaan masyarakatnya dilihat dari masih banyaknya masyarakat-masyarakat miskin yang perlu disantuni. Kemudian pembangunan desa di ketiga desa ini juga masih tergolong kurang adanya pembangunan sarana dan prasarana sehingga sulit mendapatkan sumber daya manusia berkompeten dalan hal pembangunan desa. Ketiga desa ini pun menerima Alokasi Dana Desa dari tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.2
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pada Ketiga Desa yang Ada Di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat

No	Nama Desa	Tahun	Alokasi Dana Desa	Dana Desa
1	Lawang Agung Lama	2016	127.552.800	595.564.000
		2017	303.190.000	759.334.000
		2018	378.629.000	718.247.000
2	Bandu Agung	2016	135.605.000	595.367.000
		2017	313.990.000	767.200.000
		2018	391.459.000	892.665.000
3	Muara Jauh	2016	147.952.800	595.277.727
		2017	334.390.000	758.962.000
		2018	404.129.000	920.683.000

Sumber: Penulis 2019

Pada setiap tahunnya di ketiga desa ini pemberian Alokasi Dana Desa selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016-2018. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pada ketiga desa ini digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di desa Muara Jauh masi kurangnya pembanguan dan tahap perencanaan belum tepat waktu, dan desa Bandu Agung juga masih kurangnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat masi kurang, sama hal nya dengan kedua desa di atas desa lawang Lawang agung lama juga masi kurangnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta permasalahan lainnya daalam hal pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dalam pembangunan di ketiga desa ini adalah masih

belumnya sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa

Ketertarikan memilih program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk diteliti adalah karena program Alokasi Dana Desa merupakan program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia, khususnya di ketiga desa Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat. Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan diharapkan Alokasi Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) pada ketiga desa tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan juga dengan adanya pembangunan di desa ini akan menambah pendapatan bagi

masyarakat ketiga desa tersebut. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang penulis uraikan sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di ketiga desa tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Tiga Desa Di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa pada 3 desa di kecamatan Muara Payang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada 3 desa di kecamatan Muara Payang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dan pengalaman yang baik mengenai masalah pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Ketiga Desa di Kecamatan Muara Payang.

   Khususnya bagi 3 desa yang ada di kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat agar dapat menggunakan dana desa lebih baik lagi dan ddapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan menambah sebuah referensi baru dari ilmu analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra Kusuma Putra dkk (2016) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. http://eprints.umm.ac.id/33381/1/jiptummpp-gdl-febrybiasr-44941-1-pendahul-n.pdf

Lina Nasihatun dan Mawar Suryaningtyas (2015) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480

Dampak Program Dana DesaTerhadapPeningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di KecamatanPinelengKabupatenMinahas https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/17130

Hanif (2011: 81), *PemerintahanDesaPertumbuhan&Penyelanggaraan*.

Moeljarto (2012: 41), *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*.

Moh. Sofiyanto dkk (2017) berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/2685

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa https://www.slideshare.net/zulfikri21/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa

Madiasmo. (2009) *Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik,* Yogyakarta.

Sujarweni (2015: 123), *AkuntansiDesa Panduan Tata KelolaKeuanganDesa*.

Sugiyono (2016: 56-57), MetodologiPenelitian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. https://www.berkasedukasi.com/2018/07/uu-undang-undang-nomor-6-tahun-2014.html

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah http://dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-23-Tahun-2014-Tentang-Pemerintahan-Daerah.pdf